

**PENGARUH KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN
AKUNTANSI DAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu)**

Oleh :
Riska Fahrul Razi
Pembimbing : Enni Savitri dan Al Azhar A

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : fahrulrazi1313@yahoo.com

The Influence of the adherence of the law regulation, information technology utilization, accounting control and competency of human resources in government to performance of accountability on government

ABSTRACT

the research aims to analyze of influencing the adherence of the law regulation, information technology utilization, accounting control and competency of human resources in government to performance accountability. Object of this research is department of SKPD Indragiri Hulu. There are ninety seven questionnaires were sent, but only eighty eight questionnaires are returned. That data are analyzed by linear regression method and SPSS program version 19. The results of this research showed adherence of the law regulation has an effect to performance accountability with 0,000 significance, information technology utilization has an effect to performance accountability with 0,000 significance, accounting control has an effect to performance accountability with 0,005 significance and competency of human resources has an effect to performance accountability with 0,000 significance. The results of this research also showed that coefficient R square is 82,9%. Each independent variables, gives the strong influence to dependent variable, it means independents variables could explain dependent variable well. While the remaining influenced by other variables not included in the regression models were not included in this study. All variables also have strong relation with variable dependents in this research.

Keywords: adherence of the law, information technology utilization, accounting control, and competency of human resources, performance accountability

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dalam keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Oktiandra,2010). Terkait dengan organisasi publik, akuntabilitas institusi pemerintah yang selanjutnya disebut akuntabilitas publik merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi, strategi, maupun operasionalisasi / pelaksanaannya dalam institusi yang bersangkutan (Belkoui, 2006).

Dalam inpres Nomor 7 Tahun 1999, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Inpres ini menyatakan bahwa agar terlaksananya *good governance* di Indonesia diperlukan akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

Dengan adanya Ketaatan pada peraturan, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Berdasarkan PP. Nomor 3 Tahun 2007, menyimpulkan bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan dalam menyusun laporan keuangan berupa neraca (balance sheet) dan laporan arus kas (cash flow). Kenyataannya, pemerintah daerah cenderung tidak dapat mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh peraturan

perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain Soleman (2007) dan Reynaldi Riantiarno yang menyatakan terdapat pengaruh antara ketaatan pada peraturan perundangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) .Namun terjadi perbedaan, hasil penelitian menyatakan tidak terdapat pengaruh antara ketaatan pada peraturan perundangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Variabel kedua yang diteliti adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No.11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Teknologi Informasi yg dikelola dengan baik dapat menghasilkan sebuah akses dengan biaya yang terjangkau, dan tanggap terhadap kebutuhan manusia.Pada dasarnya Teknologi Informasi tersebut dapat mempercepat pembangunan nasional menjadi lebih demokratis, berkelanjutan (sustainable), dan memfasilitasi tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera. Sasaran sebenarnya adalah bagaimana agar lebih banyak orang yang dapat memanfaatkan teknologi informasi,sehingga Teknologi Informasi dapat mendorong terjadinya transformasi sosial dan ekonomi (Halim, 2008). Suatu organisasi sekarang sudah banyak yang menjadikan Teknologi Informasi sebagai pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi yang kuat dan mampu melahirkan

keunggulan kompetitif di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat saat ini. Menurut (Wijana,2007) teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja individual anggota organisasi dan institusi yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Variabel Ketiga dalam penelitian ini adalah pengendalian akuntansi (*accounting control*).Pengendalian merupakan suatu proses melalui manajemen suatu organisasi dalam hal membuat suatu keyakinan yang beralaskan bahwa sumber daya harus digunakan secara ekonomis,efektif,dan efisien. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien dapat dilakukan dengan pengendalian manajemen yang baik pula.Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (*financial control*) dengan memanfaatkan sistem akuntansi.

Kusumaningrum (2010) mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sering disebut sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah suatu prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini, yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan, dan prosedur monitoring yang didasarkan informasi.Penggunaan sistem

pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih akurat, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif dan efisien, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam menghadapi suatu masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ? 2) Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ? 3) Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ? 4) Apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

TELAAH PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut tanggungjawabannya.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Dalam hal pembentukan akuntansi pemerintah sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk

memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai, maka PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintah (*a manual for government accounting*) yaitu dapat memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan perundangan. Secara logis, penyusunan teori akuntansi merupakan proses berurutan yang dimulai dengan pengembangan tujuan laporan keuangan dan diakhiri dengan penurunan kerangka kerja konseptual atau konstitusi untuk digunakan sebagai petunjuk teknik akuntansi. Menurut Belkaoui, merujuk kerangka konseptual pada financial accounting standards boards (FASB), sejauh ini merupakan proyek yang paling menonjol dan penciptaan konstitusi akuntansi. Konstitusi ini harus memperoleh penerimaan umum, menunjukkan perilaku kolektif dan melindungi kepentingan publik dalam area yang dipengaruhi oleh pelaporan keuangan.

Keuangan Negara yang dikelola dalam pemerintahan, harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur didalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 dan Undang – undang APBN. Pemerintah diharuskan membuat pertanggungjawaban keuangan Negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan Negara yang diperoleh dari keuangan rakyat dan untuk tujuan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara

atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib (Soleman:2007). Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, teknologi adalah : 1) metode ilmiah yang mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; 2) keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan menurut Anjarwati (2012), informasi adalah data yang telah dirangkum atau dimanipulasi dalam bentuk lain untuk tujuan pengambilan keputusan.

Informasi merupakan sekumpulan data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta dan memiliki suatu nilai yang bermanfaat, sehingga dari data tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang terbaik bagi pengguna data informasi tersebut. Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *information technology* (TI) ialah istilah umum untuk teknologi apa pun yang

membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi ialah perilaku/sikap individu dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatannya, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian intern menurut Mardiasmo (2009): pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini:

- (a) keandalan pelaporan keuangan,
- (b) efektivitas dan efisiensi operasi,
- (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Kompetensi Aparatur Pemerintah

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 tahun 2011 standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. Sedangkan kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.

Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A Tahun 2003, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai

Negeri Sipil tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan dengan pengertian undang-undang, dalam arti material, dan undang-undang dalam arti formal. Dalam konteks ini, undang-undang formal yang material adalah undang-undang yang dibentuk atas persetujuan DPR dan disahkan oleh Presiden, yang isinya mengikat Rakyat. Di Indonesia, peraturan perundangan tentang keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang-undang (UU), keputusan presiden (Keppres), dan peraturan pelaksanaan lainnya. Vina (2008) mengemukakan bahwa untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan *reward system* dan *punishment* secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. (Soleman:2007). Ketaatan pada peraturan perundangan adalah

kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

H1: Diduga ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Maridiasmo (2009) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Salah satu manfaat yang diharapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi diukur berdasarkan ketergantungan pemakai terhadap sistem informasi yang ada untuk melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

H2: Diduga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Pengendalian akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk mengamankan asset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan. Pengendalian (*control*) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan. Melalui pengendalian akuntansi yang baik, akan tersusun pelaksanaan kinerja keuangan dengan baik sehingga memudahkan proses-proses pengambilan keputusan.

H3: Diduga pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

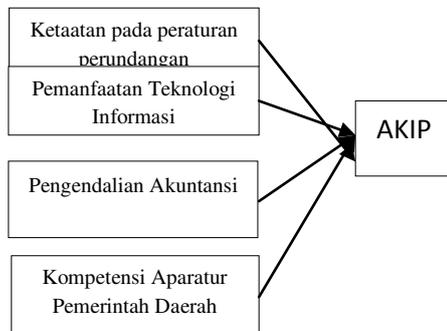
Berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai, standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

melaksanakan tugas jabatan. Sedangkan kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.

H4: Diduga kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Model Penelitian

Berikut ini adalah model penelitian dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:



Sumber: *Data Olahan, 2016*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu. Pensampelan atas responden dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Kampar. Dari setiap SKPD akan diambil 3 responden dengan kriteria

Kepala Dinas, Kasubag Keuangan dan Bendahara. Kriteria ini didasarkan bahwa tiap – tiap pihak tersebut memiliki tanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 88 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan instrument yang menggunakan kuesioner kepada SKPD.

Metode Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau ketepatan suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurinya.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data

yang digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Kedua, dengan normal probability plot, yaitu distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai $Tolerance < 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat ($ZPRED$) dengan residual ($SRESID$). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner dan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara (Soleman, 2007).

Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05. Berikut ini adalah tabel yang disajikan dalam uji validitas dan reliabilitas

Hasil Uji Reabilitas Data

Hasil uji reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden konsisten atau tidak dengan menggunakan uji SPSS dalam menjawab setiap pernyataan.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Data

No	Variabel	Nilai Cronbach	Nilai Validitas
1	Y	0,719	0.000
2	X1	0,607	0.000
3	X2	0,709	0.000
4	X3	0,713	0.000
5	X4	0,797	0.000

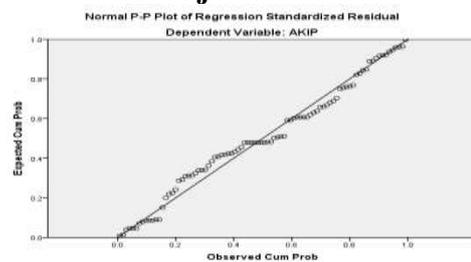
Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas. Didalam penelitian ini disajikan dalam graifik P-Plot. Dimana dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau maka model regresitidak memenuhi asumsi normalitas. Gambar penelitian ini untuk menunjukan normalitas data dari suatu penelitian.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini, nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Nilai dari *tolerance* mengukur variabilitas variabel

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* <0,10 atau nilai VIF > 10.

Nilai yang disajikan dalam uji multikolonieritas digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen memiliki kesamaan dengan variabel independen lainnya dan menghindari adanya kesamaan atas kesalahan peengganggu yang terjadi untuk masing-masing variabel independen untuk terbebas dari mutikolonieritas didalam penelitian. Uji multikolonieritas digunakan untuk varians data.

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

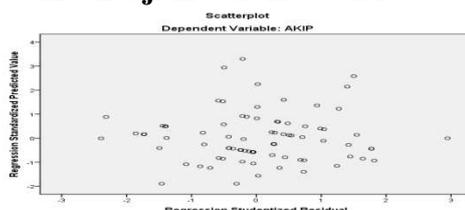
Variabel	Tolerance	VIF
X1	.909	1.444
X2	.929	1.333
X3	.837	1.570
X4	.926	1.431

Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y.

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut dengan menggunakan analisis variabel dalam penelitian untuk mengukur peengaruh atau tidaknya:

$$Y = 0,473 + 0,535X_1 + 0,520X_2 + 0,256X_3 + 0,692X_4 + e$$

- Nilai konstanta (a) sebesar 0,473. Artinya adalah apabila variabel tingkat ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah diasumsikan nol (0), maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,473.
- Nilai koefisien regresi ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 0,535, artinya adalah bahwa setiap peningkatan ketaatan pada peraturan perundangan sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,535 .
- Nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0.520, artinya adalah bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,520.
- Nilai koefisien regresi pengendalian akuntansi sebesar 0,256, artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengendalian akuntansi sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,256.

- Nilai koefisien regresi kompetensi aparatur pemerintah sebesar 0,692, artinya adalah bahwa setiap peningkatan kompetensi aparatur pemerintah sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,692.

Hasil Pengujian Hipotesis H₁

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.12 didapat nilai t_{hitung} senilai 3,873 .dengan demikian diketahui $t_{hitung} 3,873 > t_{tabel} 1,988$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yaitu ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menunjukkan pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Hal ini karena para pegawai dalam menjalankan aktivitas diutamakan prinsip efisiensi dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi ketaatan pada peraturan perundangan maka semakin meningkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Pengujian Hipotesis H₂

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.9 didapat nilai t_{hitung} senilai 2,873. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,873 > t_{tabel} 1,996$. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.12 didapat nilai t_{hitung} senilai 6,675 .dengan

demikian diketahui $t_{hitung} 6,675 > t_{tabel} 1,988$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat disimpulkan **H₂ diterima** yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menunjukkan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena para pegawai di skpd Indragiri Hulu sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Contohnya membantu penyelesaian tugas, menyimpan informasi, dan menyebarkan informasi dengan cepat, sehingga pegawai lebih efisien dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Hasil Pengujian Hipotesis H₃

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.12 didapat nilai t_{hitung} senilai 2,638 .dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,638 > t_{tabel} 1,988$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat disimpulkan **H₃ diterima** yaitu pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menunjukkan pengaruh pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena para pegawai melakukan prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk mengamankan asset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan. Pengendalian mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana

mengukur pekerjaan, dengan pengendalian yang baik maka tersusun pelaksanaan kinerja keuangan dengan baik.

Hasil Pengujian Hipotesis H₄

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.12 didapat nilai t_{hitung} senilai 4,504 dengan demikian diketahui $t_{hitung} 4,504 > t_{tabel} 1,988$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat disimpulkan **H₄ diterima** yaitu kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menunjukkan pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena para pegawai di Indragiri Hulu sudah memiliki kompetensi yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seringnya pegawai mengikuti seminar dan pelatihan dengan baik. Pegawai harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang dimiliki sehingga dengan kompetensi yang baik maka kinerja instansi pemerintah akan meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur

pemerintah yang mentaati peraturan perundangan akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- 2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa aparatur pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dapat menghasilkan kualitas dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 3) pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa aparatur pemerintah yang mengikuti pengendalian akuntansi akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 4) kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa aparatur yang menjadi kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah akan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Pada penelitian selanjutnya, diharapkan area penelitian dapat diperluas, tidak hanya pada satu SKPD Kabupaten/Kota, namun dapat menambahkan SKPD dari Kabupaten/Kota lainnya dari Provinsi sehingga lebih dapat digeneralisasikan.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang memiliki hubungan yang

cukup erat untuk berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seperti menambahkan variabel intervening ataupun variabel moderating untuk memperoleh hasil yang berbeda. Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dijadikan variabel rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya.

- 3) Ketika membagikan kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung ataupun menghubungi melalui telepon kepada responden, agar data yang diperoleh tidak bias dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, Mei. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD se-Kabupaten, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang)*. Under *Graduate thesis*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2006. *Teori Akuntansi*, Buku 1 Edisi Kelima. Jakarta: Salemba
- Halim, Abdul. 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Provinsi Jateng". *Tesis*. Program Pasca Sarjana: UNDIP.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Novita, Vina. 2008. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Pada Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)*. *Skripsi Akuntansi*. Universitas Riau.
- Oktrianda, S. 2010. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Dumai*. *Skripsi*. Universitas Riau. Pekanbaru
- Soleman, Rusman. 2007. *Pengaruh kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. *Disertasi*. Unpad.